

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Buruh pemetik teh merupakan orang yang bertanggung jawab memanen pucuk teh baik menggunakan mesin, gunting, maupun dengan sabit. Buruh pemetik teh PIR-BUN Danau Kembar merupakan pelaku usaha dalam struktur perkebunan yang berada pada strata paling bawah. Meskipun bekerja pada komoditi yang berorientasi komoditas yang memiliki daya jual tinggi, buruh perkebunan tetap saja stagnan dalam kondisi kemiskinan. Seperti lingkaran setan yang terus berputar dalam kehidupan para buruh. Buruh pemetik teh PIR Danau Kembar terjebak dalam kemiskinan struktural yang diproduksi dan dipertahankan oleh hubungan produksi perkebunan yang timpang, rendahnya daya tawar, serta ketergantungan ekonomi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami buruh pemetik teh di wilayah Perkebunan Inti-Rakyat (PIR) Danau Kembar merupakan kemiskinan akibat faktor struktural dan berakar pada relasi sosial ekonomi yang timpang dalam sistem perkebunan. Sebagai kelompok buruh yang berada pada posisi subordinat, mereka sepenuhnya bergantung pada kebijakan struktur sebagai pusat pengendali produksi, pemasaran, dan pendistribusian hasil usaha.

Kemiskinan buruh pemetik teh pada PIR-BUN Danau Kembar dianggap sebagai produk terbentuknya pola perkebunan kemitraan antara perkebunan inti dan perkebunan rakyat. Dengan menggunakan perspektif Gans dengan melihat kemiskinan buruh pemetik teh adalah akibat sistem struktural perkebunan yang mengkondisikan buruh untuk tetap berada dalam kondisi miskin sehingga mereka dapat menjalankan perannya sebagai kelas subordinat dalam sistem perkebunan.

Bentuk pemiskinan tersebut diidentifikasi melalui elemen-elemen struktural yang berpotensi melanggengkan keiskinan pada buruh. Elemen struktural tersebut adalah 1) Kepemilikan dan kontrol produksi yang dikuasi oleh kaum dominan; 2) Ketergantungan secara ekonomi; 3) Relasi kerja yang hierarkis; 4) Sistem pengupahan yang ditetapkan dengan nominal rendah; serta 5) Normalisasi bahwa miskin itu 'wajar' jika dialami oleh buruh pemetik teh. dengan memahami perspektif Gans, maka kajian ini menjadi menarik saat melihat bahwa kemiskinan yang terjadi pada buruh pemetik teh bukan semata karena rendahnya daya tawar dan persoalan individu. Namun lebih dari itu, kaum miskin justru dipertahankan untuk menjalankan sistem perkebunan yang menganut sistem hierarki.

Pada PIR-BUN Danau Kembar, buruh tidak memiliki kendali atas harga, upah, maupun akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan dan modal. Rendahnya daya tawar buruh dalam penentuan sistem upah per kilogram petikan teh menyebabkan pendapatan mereka tidak sebanding dengan beban kerja yang berat dan risiko ekonomi yang ditanggung setiap hari. Buruh hanya memperoleh 26%-31% dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan dan pemilik lahan. Dengan kondisi keluarga buruh yang memiliki jumlah tanggungan rata-rata 5 orang atau lebih, pendapatan yang demikian belum memenuhi syarat garis sejahteradengan merujuk pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlebih lagi, fasilitas yang sangat minim yang diperoleh oleh buruh memperparah posisi miskin mereka.

Adapun aspek struktural yang menggambarkan kemiskinan buruh adalah upah rendah dan tidak adanya hak-hak jaminan buruh, marginalisasi buruh pemetik

teh, serta tenaga kerja peran ganda yang semuanya bermuara pada bentuk kemiskinan struktural pada buruh pemetik teh. Peran struktural yang melanggengkan kemiskinan dengan mempertahankan posisi buruh sebagai kaum subordinat, *undeserving*, serta tak layak untuk kesejahteraan dengan memberikan daya tawar rendah terhadap buruh pemetik teh.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kemiskinan buruh pemetik teh di PIR Danau Kembar merupakan bagian dari penataan ekonomi perkebunan yang timpang di mana manfaat utama lebih banyak dinikmati oleh kaum dominan. Di sisi lain, buruh pemetik teh yang berperan dalam menopang kegiatan produksi di lapangan menjadi kaum yang dikuasai (subordinat) dan tak berdaya. Dengan kata lain, sistem perkebunan berusaha mempertahankan pola kemiskinan pada buruh pemetik teh agar sistem perkebunan berjalan yang berimplikasi pada marginalisasi buruh dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

6.2 Saran

Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan intervensi kebijakan yang menempatkan buruh sebagai subjek pembangunan, melalui peningkatan standar upah, akses terhadap lahan atau alternatif pekerjaan, perlindungan sosial yang memadai, serta restrukturisasi hubungan produksi agar lebih berkeadilan.

1. Bagi Pemerintah Daerah

- a) Pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan sektor perkebunan, khususnya yang terkait dengan sistem pengupahan buruh pemetik teh.

- b) Memperluas akses perlindungan sosial berupa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terintegrasi bagi buruh harian lepas.
- c) Menjadikan buruh sebagai target program bantuan pemerintah meskipun buruh setiap bulan mendapatkan upah, namun minim.

2. Bagi Masyarakat dan Keluarga Buruh

- a) Mendorong peningkatan partisipasi pendidikan bagi anak-anak buruh untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
- b) Mengoptimalkan potensi usaha mikro untuk menambah pendapatan keluarga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memperluas cakupan penelitian pada industri teh di lokasi atau perkebunan lain untuk memperoleh komparasi yang lebih luas.

